

Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Dede Setiawan¹, Sulaiman Abdul Aziz², Cecep Hilman³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

³Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

E-mail: sdede0723@gmail.com, sulaimanabdulaziz78@gmail.com, cecephilman77@gmail.com

Article History: Received: 2022-10-22 || Revised: 2022-11-26 || Published: 2022-12-29

Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22 || Direvisi: 2022-11-26 || Dipublikasi: 2022-12-29

Abstract

The main objectives of Community Based Education are (a) Assisting the government in mobilizing local resources and increasing the role of the community to take a greater part in planning and implementing education at all levels, types and pathways of education (b) Stimulating changes in attitudes and perceptions about a sense of community ownership of the school, a sense of responsibility, partnership, tolerance, and multicultural strength (c) Supporting government initiatives in increasing community support for schools. (d) Support the role of the community to develop institutional innovations to complement, improve and replace the role of schools and to improve quality and relevance, provide greater access, and improve the efficiency of education management. (e) Helping to overcome dropouts, especially from basic education. The role of the government or the relationship between the government and the community in community-based education should be based on a partnership relationship, meaning that the government is nothing more than a servant, facilitator, companion, partner, and funder for education. community based. The research method used is library research, namely library-based research, in the process of collecting data the researcher examines and analyzes the literature obtained from theories from books, research results and other scientific works related to Social Development and Community-Based Non-formal Education Development in improving Indonesian people. Analisis of the data used using descriptive critical analysis.

Keywords: *Community Based Education Development.*

Abstrak

Tujuan utama dari Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah (a) Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan (b) Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multicultural (c) Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah. (d) Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, serta peningkatan efisiensi manajemen pendidikan. (e) Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (partnership) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah library research yaitu penelitian berbasis kepastakaan, dalam proses pengumpulan data peneliti menelaah dan menganalisis literatur yang didapatkan dari teori dari buku, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya terkait dengan Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat nonformal berbasis masyarakat dalam meningkatkan manusia Indonesia. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis kritis deskriptif.

Kata kunci: *Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai banyak pengamat sebagai situasi dan kondisi pendidikan yang menyisakan banyak persoalan. Paling tidak terdapat tiga persoalan utama yang

menjadi ciri umum pendidikan di Indonesia masa ini. Pertama, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan menekankan uniformitas (keseragaman), yang menyebabkan format kurikulum, buku ajar, bahkan hingga penilaian hasil pendidikan diatur secara serba seragam dengan mengikuti garis petunjuk atau indoktrinasi dari pemerintah pusat di Jakarta. Kebijakan seperti ini pada gilirannya menutup ruang gerak pengembangan dan improvisasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat tempat pendidikan berlangsung. Kedua, kebijakan pendidikan nasional yang diskriminatif dalam memperlakukan sekolah swasta, sehingga mengesankan bahwa pendidikan hanya milik pemerintah, bukan milik masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara “negeri” dan “swasta”, di mana mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan pada sekolah negeri, sehingga kualitas sekolah swasta terabaikan. Kebijakan diskriminatif ini juga diberlakukan antara sekolah umum milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan sekolah agama (madrasah) milik Departemen Agama. Menurut catatan Azra, kebijakan yang tidak adil dalam penganggaran dan pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita bagi lembaga pendidikan Islam tampak dalam indeks biaya per kapita pendidikan per siswa di madrasah yang jauh lebih kecil dibanding di sekolah umum. Kebijakan diskriminatif ini berimplikasi pada terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan (limited capacity) bagi seluruh warga. Lebih jauh Hafid Abbas menilai, kebijakan diskriminatif ini menunjukkan bahwa dimensi HAM (hak asasi manusia) dalam pendidikan Orde Baru belum ditegakkan. Ketiga, sistem pendidikan yang belum mampu memberdayakan masyarakat secara kualitas, meskipun secara kuantitas pendidikan masa Orde Baru telah memperlihatkan prestasi yang cukup baik. Secara kuantitas, peserta didik dari tahun ke tahun terus meningkat, tapi secara kualitas ini tidak dapat dibanggakan. Laporan UNDP (United Nations Development Programme) tahun 1996 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas SDM (Human Development Index/HDI) Indonesia berada pada urutan ke 102 dari 174 negara di dunia. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dari segi kualitas ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru sejak awal sudah menskenariokan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Kurikulum nasional, evaluasi belajar terpusat melalui NEM (Nilai Ebtanas Murni), mementingkan aspek kognitif dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor, dan praksis pendidikan yang subject matter oriented bukan children oriented, merupakan di antara indikator kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kualitas manusia Indonesia.

Dari situasi dan kondisi tersebut tampak bahwa pendidikan bagi Orde Baru merupakan urusan birokrasi pemerintah, di mana masyarakat tidak ikut di dalam prosesnya. Meskipun dalam UU RI No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional namun dalam pandangan Tilaar, hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pendidikan nasional masih menerapkan sistem sentralistik yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Konsekuensinya, otonomi penyelenggaraan pendidikan mengalami keterbatasan, karena berbagai bentuk inovasi pendidikan telah ditentukan dari atas. Dengan sistem birokrasi pendidikan yang sentralistik ini, lembaga-lembaga pendidikan di masa Orde Baru tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan otonom.(Suharto 2013).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berlandaskan pada post-positivisme yang berarti mengeksplorasi atau menemukan teori. Metode penelitian yang digunakan adalah library research yaitu penelitian berbasis kepustakaan, dalam proses pengumpulan data peneliti menelaah dan menganalisis literatur yang didapatkan dari teori dari buku, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya terkait dengan Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat nonformal berbasis masyarakat dalam meningkatkan manusia Indonesia. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis kritis deskriptif.(Muslim 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Berdirinya Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kemunculan paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community based education) salah

satunya dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Lahirnya demokratisasi pendidikan memang bukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit pendidikan, seperti menghilangkan diskriminasi pendidikan, atau mendapatkan pendidikan murah dan bermutu. Tetapi setidaknya demokratisasi pendidikan memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama, adil, menghormati harkat martabat sesama manusia, dan peluang kerja sama yang dapat memenangkan semua pihak. Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan tertuang dalam UU Sisdiknas 2003, Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Dan ayat 6 yang menyebutkan: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan."

Implikasinya, pendidikan harus dikelola secara otonomi, kolaboratif dan terdesentralisasi, dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi ini berupa kerja sama antara masyarakat (warga) dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip "Pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi). Otonomi, dan desentralisasi pendidikan akan berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Artinya, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, dan institusi pendukungnya, dalam penyelenggaraan pendidikan, akan lebih besar dari pada pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi konsep tersebut, maka pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan suatu keharusan. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan sebuah gerakan kesadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Pendidikan Berbasis Masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Secara konseptual, Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat." Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Dan pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.

Sementara itu Indra Djati Sidi menjelaskan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan konsepsi yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Lebih jauh dari itu, menurutnya, Pendidikan Berbasis Masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Berbasis Masyarakat selain memberikan rasa memiliki (sense of belonging) bagi anggota masyarakat terhadap sekolah yang dibinanya, juga menciptakan iklim keterbukaan dan memberikan kontrol bagi sekolah dalam mengelola sumberdaya dan mutu pendidikan yang ingin dicapai (Hasmia 2019). Pendidikan berbasis masyarakat secara historis sudah dilaksanakan dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai motivator bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang lahir dan berkembang karena adanya al-Qur'an sebagai motivator. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam hasil inisiatif masyarakat dan muncul dalam berbagai model. Stanton misalnya menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut antara lain Kuttub, Mesjid, Madrasah. Hasan Abd'al juga melakukan penelitian khusus mengenai institusi-institusi pendidikan Islam abad

keempat hijriyah, menyebut bahwa institusi tersebut meliputi: al-Kuttab, al-Mesjid, Hawanit, al-Maraqim, Manazil al-Ulama, al-Salun, al-Adabiyah, Duat al-Kuttub wa Daur al-'Ilm al-Madrasah. Lembaga pendidikan kuttab suatu pendidikan dasar yang diberikan sebelum mereka masuk ke lembaga mesjid. Menurut Izzuddin Abbas yang disadur Hasan Langgulung ada dua macam kuttab: pertama, untuk anak-anak orang kaya yang membayar iuran pendidikan. Kedua, untuk anak-anak orang miskin yang disebut kuttab al-Sabil (pondok orang dalam perjalanan). Di sini pendidikan cuma-cuma bertujuan menyiapkan murid-murid pada lingkungan (halaqah) mesjid-mesjid atau berbagai sekolah yang didirikan pada zaman Abbasiyah.

Mesjid sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pokok pada zaman Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Ketika ilmu-ilmu asing memasuki masyarakat Islam, pusat pengkajiannya di mesjid dan harus dipelajari bersama-sama dengan ilmu agama. Mesjid di samping, sebagai fungsi utamanya untuk tempat ibadah, juga menjadi sentral kegiatan masyarakat muslim. Masyarakat muslim pada masa-masa awal telah memperluas fungsi mesjid. Mereka menjadikan mesjid sebagai tempat untuk beribadah, lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, rumah penyambutan para duta, dan yang paling umum dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Di Baghdad pada masa itu, terdapat beribu-beribu mesjid diberbagai tempat. Para penguasa seperti Adud al-Daulah (w. 965), al-Sahib bin 'Abbad (w. 995), dan Da'ilil al-Sijitani (w. 9691) merupakan pelopor yang mendukung perkembangan mesjid dan pendidikan, atau dengan istilah Nicholas Hans, mesjid dianggap sebagai universitas Islam pertama. Kemajuan ini dicapai oleh masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan lain mulai yang dalam dunia Islam adalah Dar al-Hikmah, yang tersiar di berbagai dunia Islam, seperti Meusil, Cairo, Fustat, dan Hilb. Di samping lembaga-lembaga tersebut di atas, muncul juga lembaga-lembaga pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya dari lembaga-lembaga tersebut, yang diwujudkan oleh suasana kehidupan zaman Abbasiyah, begitu juga dengan kemajuan ilmiah, kemakmuran ekonomi, yang disaksikan di zaman ini, seperti istana-istana, beberapa perpustakaan, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut tidak mengenal tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu. Tidak ada tingkatan rendah atau permulaan, menengah dan lain-lain, tetapi hanya mengenal satu tingkatan saja yang dimulai dengan kuttab atau guru-guru khusus dan berakhir di diskusi berseri (halaqah) di mesjid. Juga tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Kadang-kadang kuttab sekedar mengajarkan membaca dan menulis al-Qur'an, kadang juga mengajarkan bahasa, nahwu dan'aurad. Setiap guru mempunyai metode tersendiri. Di mesjid-mesjid besar terdapat beberapa halaqah untuk berbagai pelajaran. Para siswa bebas mengikuti pelajaran. Para siswa bebas mengikuti dan memilih halaqah dan guru yang disukai. Setelah tamat pada seorang guru, ia berpindah ke guru lain. Juga tidak ada ijazah atau gelar ilmiah yang diberi kepada orang yang menamatkan pelajaran sesudah ujian. Akan tetapi ada ujian-ujian pendapat atau pemikiran sekitar yang dipelajari itu, dari guru-guru dan ulama. Kegiatan ini diistilahkan Munadlarah. Di masa ini pula sebagai zaman keemasan dunia Islam, berkembang ilmu pengetahuan dan lahirnya intelektual dalam berbagai bidang. Madrasah merupakan system pendidikan Islam dan merupakan era baru bagi institusi pendidikan Islam. Madrasah sudah merupakan salah satu organisasi resmi negara, sehingga dengan berdirinya sistem madrasah, maka madrasah berpisah dengan mesjid. Ada tiga teori yang menimbulkan munculnya madrasah. Pertama, karena kegiatan pendidikan di mesjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. Kedua, karena berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Ketiga, karena timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembentukan madrasah telah dimulai pada awal abad ke-9, sekolah tinggi yang sebenarnya ternyata baru pertama kali didirikan di Naisabur Iran, pada awal abad ke-11. Namun yang paling terkenal yang hingga saat ini menjadi model sistem pendidikan madrasah keseluruhan, dibangun pada tahun 1057 oleh Nizam al-Mulk di Bahgdag, dikenal sebagai madrasah Nizamiyah. Karena kemasyhurannya madrasah ini meluas dan merangsang pertumbuhan institusi yang sama. Ensiklopedi Islam menuturkan: "Antusias dan energi Nizam al-Mulk di

memberi arti awal periode baru kejayaan madrasah, Sultan dan kaum pria yang berkedudukan tinggi kini tertarik pada madrasah dan tipe yang dikembangkan. secara perlahan-lahan oleh Nizam al-Mulk ini kemudian menjadi lebih lazim dengan model pendidikan memasukkan siswa ke asrama. Selama berabad-abad beberapa universitas Islam memimpin kegiatan intelektual dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan prestasi terbaik muslim klasik. Madrasah atau al-Jami'ah dibuka untuk umum dan menjadi pusat pendidikan internasional. Lebih dari itu, pengawasan tertinggi madrasah dipegang oleh ulama dan cendekiawan muslim yang memberikan lingkungan belajar secara individual dan personal. Inilah desentralisasi dalam dunia pendidikan. (Syakdiah 2000). Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai model ini membuktikan bahwa secara historis pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan umat Islam sudah mempraktekannya. Suasana inilah yang menyebabkan umat Islam sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan berbagai bidang lainnya. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan juga dapat dijumpai pada masyarakat di Indonesia, sebelum pemerintah mendirikan madrasah, umat Islam telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Surau, Rangkang, Langgar, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah. Institusi-institusi tersebut lahir dari peran aktif masyarakat dalam bidang pendidikan. Dari lembaga-lembaga inilah, lahir tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Hamka, KH. Abdullah Ahmad, KH. Hasyim Asy'ari, KH Imam Zarkasyi dan beberapa tokoh lainnya.

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di atas, dalam berbagai bentuk dan coraknya, merupakan upaya pendidikan berbasis masyarakat secara terbuka, sampai muncul pesantren, lembaga pendidikan Indonesia cenderung eksklusif. Bahkan pada zaman penjajahan, sekolah-sekolah pada mulanya didirikan untuk kalangan bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah-sekolah rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam semula bersifat terbuka bagi masyarakat luas. Uraian singkat di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ekstensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga kondisi: Pertama, pergumulan dengan budaya lokal pra Islam melahirkan pesantren. Kedua, interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern telah menghasilkan lembaga madrasah. Ketiga, interaksi Islam dengan politik Hindia Belanda telah membuatkan sekolah Islam. Sejarah telah menuliskan bahwa ternyata masyarakat telah mampu mendirikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Di samping itu, lembaga yang lahir secara mandiri telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan. Hal ini sebenarnya menjadi renungan dan pemikiran di tengah arus reformasi, di mana kemampuan pemerintah amat terbatas, maka konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan alternatif yang perlu mendapat dukungan, dan realisasi. Pengertian lebih luas tentang Pendidikan Berbasis masyarakat adalah: "as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, sosial, economic and political need". (Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela tempat pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik).

Dengan demikian dapat difahami bahwa sebuah pendidikan dapat disebut berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga pelaksanaannya berada di tangan masyarakat (community). Dan sebaliknya jika semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan berbasis pemerintah (state-based education), jika semuanya ditentukan oleh sekolah, maka disebut pendidikan berbasis sekolah (school-based education). Atas dasar itu, secara prinsip Pendidikan Berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan teknologi (Masduki 2014).

B. Tujuan, Pendekatan dan Sasaran Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pada dasarnya, sebuah pendidikan disebut berbasis masyarakat apabila tanggung jawab pendidikan mulai dari perencanaan hingga penilaian berada di tangan masyarakat. Di ini terma "berbasis masyarakat" sebenarnya menunjuk pada derajat kepemilikan Masyarakat. Karena itu, jika masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan kependidikannya, terkait menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan lain-lainnya, maka pendidikan itu betul-betul berbasis masyarakat. Sebaliknya, apabila semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan berbasis negara. Terkait dengan ini, Tilaar seorang pakar pendidikan kritis di Indonesia, menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu paradigma baru pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat. Disebut dari masyarakat karena pendidikan haruslah menjawab kebutuhan masyarakat sendiri, disebut oleh masyarakat karena masyarakat bukan objek pendidikan yang melaksanakan kemauan negara, tapi masyarakat adalah subjek pendidikan yang melaksanakan pendidikan, dan disebut bersama- sama masyarakat karena masyarakat tidak disubordinasikan oleh pemerintah. Sekalipun misalnya pemerintah adalah penyedia dana, tapi subsidi atau bantuan pemerintah ini tidak mengurangi otoritas masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan paradigma ini, pendidikan tidak lagi sentralistis dan birokratis, yang cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek penerima apa yang telah ditentukan pemerintah. Apabila masyarakat masih dijadikan objek pendidikan oleh pemerintah, dengan berbagai proyeknya, maka pendidikan ini akan menjadi "asing" bagi masyarakat, karena masyarakat merasa tidak memilikinya. Oleh karena itu, bagi Tilaar, "pendidikan adalah milik rakyat dan oleh sebab itu rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakannya sendiri. Inilah yang disebut *community-based education* terlepas dari otoritas birokrasi pusat.

Senada dengan Tilaar, Freire menegaskan bahwa program pendidikan seyogianya merupakan realitas yang harus diubah secara bersama-sama oleh masyarakat sesuai dengan pandangan dunia yang dimilikinya, sebagai situasi objektif. "Seseorang tidak dapat mengharapkan hasil yang positif dari sebuah tindakan politik pendidikan yang tidak menghargai pandangan dunia yang dianut masyarakat. Program pendidikan semacam ini justru merupakan serangan kebudayaan, meskipun niat yang dikandungnya adalah baik", demikian tulis Freire. Penghargaan terhadap otoritas masyarakat untuk menyusun program pendidikannya sendiri, menurut Freire, dilakukan agar masyarakat dapat menjadi "tuan" bagi pemikirannya sendiri. Mereka berdialog dan berdiskusi tentang pemikiran dan pandangannya mengenai realitas yang dihadapinya. Di sinilah letak alasan mengapa secara dialogis masyarakat perlu dilibatkan dan harus mengambil bagian dari sebuah program pendidikan yang disusun secara bersama. Terkait dengan kepemilikan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat, Galbraith menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dipegangi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.

1. Menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Semua anggota masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk dilibatkan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dalam mengidentifikasi sumber daya masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
2. Membantu diri sendiri (*self-help*). Anggota masyarakat merupakan yang terbaik untuk dilayani ketika kapasitas mereka untuk membantu diri sendiri didukung dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dengan membangun kemerdekaan diri, bukan ketergantungan, ketika mereka mengasumsikan tanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri.
3. Pengembangan kepemimpinan (*leadership development*). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan, seperti dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan dalam proses kelompok sebagai alat penopang untuk membantu diri sendiri dan sebagai usaha untuk peningkatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Lokalisasi (*localization*). Potensi terbesar untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi terjadi ketika berbagai jasa pelayanan, program-program, dan peluang-peluang keterlibatan masyarakat dibuat sebegitu dekat dengan tempat- tempat di mana mereka tinggal.

5. Pemberian pelayanan terintegrasi (integrated delivery of services). Kerja sama antar jawatan di antara organisasi-organisasi dan agen-agen yang bekerja bagi masyarakat kiranya dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Merupakan hal yang lebih baik melayani masyarakat dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan agen-agen lain yang bekerja demi kepentingan umum.
6. Mengurangi duplikasi pelayanan (reduce duplication of services). Masyarakat perlu menggunakan sumber daya fisik, keuangan, dan sumber daya manusia yang dimilikinya, serta mengkoordinir sumber daya-sumber daya itu tanpa harus melakukan duplikasi pelayanan.
7. Menerima keanekaragaman (accept diversity). Pemisahan atau pengasingan orang-orang berdasarkan umur, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau kondisi-kondisi tertentu dapat menghalangi pengembangan yang penuh menyangkut masyarakat. Pencantuman tentang kelompok representatif yang mewakili keseluruhan dari penduduk masyarakat yang luas dijamin di dalam pengembangan, perencanaan, dan implementasi program-program, pelayanan, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan.
8. Tanggung jawab kelembagaan (institutional responsiveness). Melayani kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus merupakan suatu kewajiban lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani masyarakat.
9. Belajar sepanjang hidup (lifelong learning). Peluang-peluang bagi proses belajar, baik formal maupun informal, harus tersedia untuk anggota masyarakat dari semua usia di dalam suatu masyarakat yang luas (Suharto 2013) .

Beberapa prinsip di atas pada intinya menegaskan bahwa dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat memiliki kemandirian dan kewenangan untuk menentukan nasib pendidikannya sendiri. Nasib pendidikan yang dikelola oleh masyarakat secara swasta bukan ditentukan oleh pemerintah secara sentralistik. Bagi pendidikan kritis, sebagaimana dikatakan Tilaar dan Freire di atas, masyarakat adalah “tuan” bagi proses pendidikan yang dilaksanakannya, yang karenanya masyarakat berhak menentukan segala kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom. Dalam kaitan ini, prinsip kemandirian dan otonomi lembaga pendidikan dalam menentukan segala kebijakan pendidikannya merupakan prasyarat utama bagi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat. Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengarah pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penanganan masalah kesehatan, dan sebagainya (Zubaedi 2019). Tujuan pendidikan berbasis masyarakat hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan dan pendidikan ini berlangsung terus-menerus dan seumur hidup (long life education). Menurut E. Mulyasa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak,
2. Memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat,
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam.(Rahmawati n.d.)

Pendidikan berbasis masyarakat ini pada intinya merupakan model pendekatan yang menekankan pada pelibatan masyarakat. Berdasarkan konsep yang di jelaskan di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini yaitu:

1. Pertama, penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini agar dapat meningkatkan proses dan kualitas pendidikan yang merata, efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kedua, penerapan pendidikan berbasis masyarakat juga bertujuan untuk mengubah suasana, tradisi atau pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sentralistik (pemerintah pusat) ke sistem penyelenggaraan yang bersifat desentralistik (kabupaten/kota).

3. Ketiga, penerapan pendidikan berbasis masyarakat agar dapat menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang merata dan efisien, bermakna dan relevan dengan aspirasi masyarakat dalam suasana penyelenggaraan yang demokratis, dialogic, transparan, akuntabel serta penuh kebersamaan.
4. Keempat, penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang dapat merubah masyarakat sesuai kekhasannya. Perubahan tersebut diartikan sebagai perubahan dalam struktur social seperti perubahan dalam besaran penduduk, peran agama, moralitas, tata nilai dan norma budaya, dan sebagainya.

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat ini juga dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu tujuan yang berkaitan dengan tujuan individu lulusan dan tujuan kelembagaan. Secara individu, pendidikan berbasis masyarakat diharapkan mampu meluluskan individu untuk memiliki: (a) kemampuan menentukan diri, (b) membantu dirinya keluar dari masalah yang dialaminya, (c) mengembangkan kemampuan kepemimpinan, (d) menerima keberagaman atau perbedaan, dan (e) memiliki keterampilan kerja. Secara kelembagaan, pendidikan berbasis masyarakat bertujuan untuk: (a) memberikan layanan prima dan terpadu bagi masyarakat, (b) memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat local, (c) memanfaatkan segenap sumber yang ada di masyarakat, (d) memperbaiki kualitas hidup masyarakat, (e) tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan (f) mewujudkan pendidikan seumur hidup (Hasmiati 2020). Adapun tujuan utama dari Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan
2. Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural
3. Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah.
4. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, serta peningkatan efisiensi manajemen pendidikan.
5. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar (Hasmiati 2019).

C. Peran Pendidikan Berbasis masyarakat dan Pemerintahan

Kebijakan pendidikan Islam Orde Baru diresponsi oleh Persatuan Islam sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang concern pada transformasi sosial bagi masyarakatnya. Mengikuti kerangka Gramscian, respons ini diwujudkan Persatuan Islam dalam dua strategi perjuangan, yaitu perjuangan jangka panjang yang bersifat kultural dan ideologis, dan perjuangan jangka pendek yang bersifat praktis kelembagaan. Kedua bentuk respons ini sedemikian rupa telah memposisikan Persatuan Islam dengan pesantrennya berada pada wilayah intelektual organik, yang berbeda dengan intelektual tradisional. Sebagai intelektual organik, Persatuan Islam telah melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam. Persatuan Islam sedemikian rupa menjadi representasi Islam yang mencoba menegakkan ideologi Islam dengan mempertahankan ajaran dan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang berbeda dengan ideologi dominan (Suharto 2013). Pendidikan berbasis masyarakat dalam pembelajaran berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan peserta didik dengan mengakomodasinya melalui pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui dan menyadari kebutuhan dan segala hal yang diinginkannya daripada pemerintah yang mungkin menyelenggarakan pendidikan yang seragam dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Namun perlu disadari pula bahwa pendidikan berbasis masyarakat akan eksis dan berjalan dengan baik manakala masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan berdaya dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap pendidikan berbasis masyarakat yang ada.

Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (*partnership*) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat. Dengan hubungan seperti ini pemerintah tidak mendominasi, memonopoli, dan sebagainya atas lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. Pada pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang lebih banyak mengambil keputusan. Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan spirit pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat, hal ini dilaksanakan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu CBE merupakan upaya penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sehingga peranan pemerintah untuk mensukseskan CBE ini menjadi sangat penting. Menurut Umberto Sihombing terdapat lima peran pemerintah dalam pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat, yaitu:

1. Peran sebagai pelayan masyarakat Dalam pengembangan CBE (Pendidikan Berbasis Masyarakat) prinsip yang diterapkan adalah “memberikan pelayanan terbaik” bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.
2. Peran sebagai fasilitator Pemerintah menjadi fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
3. Peran sebagai pendamping Pemerintah melepaskan peranannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.
4. Peran sebagai mitra Pemerintah harus dapat memerankan fungsinya sebagai mitra bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama.
5. Peran sebagai penyandang dana Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan mendanai kegiatan belajar masyarakat.

Masyarakat memegang peranan sentral dan setrategis dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat atau CBE. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan CBE dapat dikelompokkan sebagai berikut adalah:

1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan pengelola program.
4. Pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menata berbagai upaya pendidikan berbasis masyarakat. Peran tersebut harus terwujud secara harmonis dalam semangat kebersamaan untuk saling mengisi secara bertanggungjawab (Masdudi 2014) hlm. 111.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Education*) merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua hal, termasuk di dalamnya

pendidikan. Dalam situasi semacam ini pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat diantaranya adalah *Self determination* (menentukan sendiri), *Self help* (menolong diri sendiri), *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan) *Localization* (lokalisasi), *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian layanan), *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan), *Accept diversity* (menerima perbedaan), *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan), dan *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup). Dilihat dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pesantren. Nilai-nilai keagamaan seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *jihad* (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang berorientasi atau tertuju pada pengembangan masyarakat yang terfokus pada upaya perekayasaan sosial. Pendidikan berbasis masyarakat ini menaekankan pada keterlibatan siswa atau peserta didik dalam aktifitas didalam dan diluar kelas. Dengan begitu pendidikan berbasis masyarakat ini merupakan usaha yang dapat menumbuhkembangkan pendidikan yang berawal dari bawah dimana pendidikan terjadi atau berakar dari masyarakat. Dalam pendidikan berbasis masyarakat ini pastinya juga memiliki komponen yang merupakan karakteristik dari model pbm (pendidikan berbasis masyarakat) yaitu: (a) otonomi, yang merupakan kewenangan dalam pengaturan diri, (b) partisipasi masyarakat, yang dimaksud adalah dimana masyarakat turut terlibat dalam proses pelaksanaannya, (c) pemberdayaan masyarakat, disini masyarakat dapat dilihat dari segi kualitas sumberdaya dan potensi yang dimilikinya. Konsep pendidikan luar yang berbasis masyarakat ini adalah pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada pada lingkungan masyarakat tertentu dengan melihat atau meninjau dari masa depan, dengan demikian konsep pendidikan berbasis masyarakat ini adalah "*dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat*". Pendidikan berbasis masyarakat ini juga memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Secara individu, yang diharapkan mampu meluluskan individu untuk memiliki kemampuan menentukan diri, membantu dirinya keluar dari masalah, mengembangkan kemampuan kepemimpinannya, menerima keberagaman atau perbedaan, dan memiliki keterampilan kerja.
2. Secara kelembagaan, pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki tujuan yaitu memberikan layanan prima yang terpadu, memberikan layanan yang sesuai dengan masyarakat, memanfaatkan segenap sumber yang ada, memperbaiki kualitas hidup, tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan mewujudkan pendidikan se umur hidup.

Pelaksanaannya dari konsep pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan model ini melalui pelebagaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). PKBM ini biasanya menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang tidak terpakai lagi yang mereka manfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat ini. Tidak hanya itu peran dari pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan disini sebagai actor utama dalam program pelaksanaan ini, dimana pemerintah sebagai penyokong atau pendukung dibagian pendanaan dalam program sedangkan masyarakat merupakan actor penting sebagai dasar dari pendidikan berbasis masyarakat dimana pendidikan ini bermaksud untuk memajukan tingkat kualitas hidup masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat memberi beberapa saran yang dirinci sebagai berikut:

1. Perlu ada perubahan sikap yaitu perubahan yang melibatkan pendidikan secara utuh
2. Perlu adanya perubahan ola perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan dari pusat.
3. Perlu adanya perubahan sikap birokrat dalam berperilaku untuk memberdayakan masyarakat.
4. Perlu diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk megelola sendiri pendidikan yang di butuhkan.
5. Lembaga-lembaga kemasyarakatan perlu diberdayakan dalam mendukung program pendidikan berbasis masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Hasmiati. 2019. "Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Rajagrafindo* 7(1): 65–71.
- . 2020. "Skripsi Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 7(1): 65–71.
- Masduki. 2014. "Demokratisasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Edueksos* III(2): 127–44.
- Muslim, Abd. Qadir. 2020. "Peran Manajemen Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Peningkata Sumber Daya Manusia Di Indonesia." *Pratama Widya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5(2): 159–68. <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PW/article/view/1855>.
- Rahmawati, Desi. "Makalah Kelompok Pendidikan Berbasis Masyarakat."
- Suharto, Toto. 2013. *PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*. 1st ed. ed. FATABA Press. Surakarta: Fataba Press. www.fataba.iain-surakarta.ac.id.
- Syakdiah, H. 2000. "Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Taushiah FAI UISU* 9(2): 86–95.